

---

## KETIMPANGAN GENDER DI BALI: ANALISIS BUDAYA PATRIARKI, PERAN ADAT DAN AGAMA, SERTA RELEVANSINYA DI DUNIA MODERN

Galuh Anissa Sekar Ayu\*, Putra Ardiansyah, Royhan Ahmad Dinarlie  
Universitas Brawijaya, Indonesia  
E-mail: galuhskar@student.ub.ac.id

**Abstract.** *This research is motivated by the patriarchal culture that is strongly embedded in the Balinese cultural system. The patriarchal culture that penetrates into the life of the Balinese people is predicted to be the biggest cause of gender inequality in various areas of people's lives. Gender inequality in the province of Bali can be found in the social, economic, cultural, political, and demographic fields. The main objective of this research is to provide answers to the formulation of the problem " How is the patrilineal system in Bali, the geographical location influencing patriarchal culture, and the roles of customs and religion contribute to gender inequality in the realms of family and society, and its relevance in the present day? The formulation of the problem will be answered using the concepts of liberal feminism, gender equality, and patriarchal culture with qualitative research methods. We argue that the patrilineal system is the biggest cause of imperial patriarchal culture and gender inequality in Bali. The research results indicate that the patrilineal system is closely related to the customs and norms of Balinese society. Moreover, the geographical location also contributes to the establishment of a patriarchal dominance in Bali. However, some Balinese communities perceive that the culture causing this gender imbalance is no longer relevant.*

**Keywords:** *patriarchal culture; gender equality; liberal feminism; balinese society*

**Abstrak.** Penelitian ini dilatarbelakangi oleh budaya patriarki yang melekat kuat dalam sistem kebudayaan masyarakat Bali. Budaya patriarki yang menelisis masuk ke dalam kehidupan masyarakat Bali digadagadag menjadi penyebab terbesar ketimpangan gender dalam berbagai bidang kehidupan masyarakatnya. Ketimpangan gender di Provinsi Bali banyak ditemui pada bidang sosial, ekonomi, budaya, politik, hingga kependudukan. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk memberi jawaban atas rumusan masalah "Bagaimana kentalnya sistem patrilineal di Bali, lokasi geografis yang mempengaruhi budaya patriarki, dan peran adat serta agama menyebabkan ketimpangan gender pada ranah keluarga dan sosial serta relevansinya saat ini?" Rumusan masalah tersebut akan dijawab menggunakan konsep feminisme liberal, kesetaraan gender, dan budaya patriarki dengan metode penelitian kualitatif. peneliti berargumen sistem patrilineal menjadi penyebab terbesar kekaisaran budaya patriarki dan ketimpangan gender di Bali. Hasil penelitian menunjukkan sistem patrilineal berkaitan erat dengan adat dan norma masyarakat Bali. Pun letak geografis turut menentukan kekisaran patriarki di Bali. Beberapa masyarakat Bali menilai budaya yang menyebabkan ketimpangan gender ini dinilai sudah tidak relevan.

**Kata Kunci:** budaya patriarki; kesetaraan gender; feminisme liberal; masyarakat bali

\*Corresponding author

## Pendahuluan

Dewasa ini ketidaksetaraan dan ketidakadilan gender merupakan isu sentral dalam masyarakat modern. Adanya perbedaan perlakuan seseorang berdasarkan gendernya telah menjadi suatu hal yang dinormalisasi oleh masyarakat, tak terkecuali dalam lingkungan keluarga sekalipun. Keluarga sebagai tempat pendidikan pertama anak merupakan fondasi dasar dalam pembentukan kepribadian dan pemahaman terkait peran gendernya dalam masyarakat. Namun, dalam masyarakat modern, fenomena ketimpangan gender masih sering dijumpai pada kebudayaan keluarga masyarakat Indonesia. Sejatinya, semua anggota keluarga seharusnya memiliki hak yang sama dalam memperoleh pendidikan, baik laki-laki maupun perempuan. Kenyataan tidak sejalan dengan harapan normatif tersebut. Pembagian tugas rumah tangga kerap kali diserahkan dan diemban oleh kaum perempuan saja (Qomariah, 2019, p. 52). Kaum perempuan sering kali dikonstruksikan sebagai pengembang utama tugas-tugas domestik oleh masyarakat kita. Misalnya, kegiatan mencuci dan memasak dicap sebagai tugas baku seorang perempuan dan mereka akan dipandang buruk apabila tidak dapat melakukannya. Selain itu, adanya stigma bahwa wanita tidak perlu sekolah tinggi turut menyumbang kekalnya kekaisaran patriarki di sejumlah provinsi dengan adat istiadat yang kental di Indonesia.

Bali merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang menganut sistem kekerabatan patrilineal. Kekerabatan patrilineal merupakan sistem yang menentukan garis keturunan dari pihak laki-laki atau pihak bapak dalam keluarga. Oleh karena itu, terdapat konsekuensi penerus ahli waris, hak, kewajiban, dan adat yang diserahkan kepada laki-laki semata. (Setiawan et al., 2022, p.94). Dengan mengikuti sistem ini, kelahiran keturunan berjenis kelamin laki-laki menjadi keharusan dan sesuatu yang didambakan sehingga menyebabkan tekanan dan diskriminasi pada perempuan yang tidak melahirkan keturunan laki-laki. Bahkan, tidak jarang perempuan dianggap tidak sempurna karena tak kunjung melahirkan anak laki-laki guna menunaikan kewajibannya dalam melanjutkan garis keturunan keluarga. Perempuan juga disimbolkan sebagai “pradana” atau dapat dikatakan femininitas perempuan bali diproyeksikan sebagai figur pradana sempurna sehingga perempuan diakui keberadaannya ketika ia mampu menjadi seorang istri dan melahirkan anak laki-laki (Ni Nyoman Rahmawati, 2016, p. 59). Ketimpangan gender yang lahir diiringi berbagai stigma buruk terhadap perempuan telah menjadi urgensi karena membatasi hak-hak yang seharusnya dimiliki mereka dan mengarah pada pelanggaran hak asasi manusia. Kesetaraan gender penting diperjuangkan demi menjunjung persamaan hak sebagai manusia dan juga untuk menghilangkan segala bentuk diskriminasi, eksploitasi, dan kekerasan yang sering dialami oleh perempuan. Dampak ketimpangan gender ini tidak hanya mempengaruhi sebagian kecil ranah privat perempuan, tetapi sampai ke ranah publik.

Perbedaan perilaku terhadap kelamin sosial pada masyarakat Bali di ranah publik berdampak pada beberapa bidang kehidupan, seperti bidang pendidikan, ketenagakerjaan, politik, serta bidang kependudukan. Sebagai contoh, bidang politik yang terdampak ketimpangan gender terjadi pada berbagai aspek, seperti legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Di bidang legislatif ketimpangan ini dapat terlihat dari jumlah anggota DPRD bali dengan total 55 orang anggota DPRD bali hanya terdapat 1 orang perempuan. Ketimpangan di bidang eksekutif juga dapat dilihat melalui kecilnya persentase perempuan yang menduduki jabatan tinggi di pemerintahan. Perempuan yang menduduki jabatan tingkat eselon II hanya ada 4 dari 46 orang, eselon III terdapat 25 dari 223 orang dan eselon IV hanya 220 dari 753 orang. Dalam bidang yudikatif,

presentasi penegak hukum seperti jaksa, pengacara dan Polri berbicara fakta. Jumlah jaksa perempuan yang ada di Bali berjumlah 47 dari 145 jaksa yang ada, perempuan yang menjadi pengacara hanya 72 dari 282 pengacara yang ada, dan setidaknya hanya terdapat 439 polwan dari 10.144 orang polisi (BPS Provinsi Bali, 2002).

Dari data pada paragraf sebelumnya, dapat terlihat bahwa perempuan Bali masih menerima diskriminasi dalam partisipasinya. Tiap individu seharusnya dibebaskan dalam menentukan pilihan dan mengambil keputusan dalam hidup, seperti pilihan wanita untuk ikut andil dalam kegiatan pemerintahan dan pekerjaan. Oleh karena itu, peneliti mencoba melakukan kajian terhadap fenomena ketimpangan gender di Bali dengan melakukan analisis di lingkup keluarga dan sosial masyarakat Bali menggunakan sejumlah pendekatan, seperti pendekatan feminisme, konsep budaya patriarki, dan konsep ketimpangan gender.

Penelitian terdahulu berjudul “*Perempuan Bali Dalam Pergulatan Gender (Kajian Budaya, Tradisi, dan Agama Hindu)*” yang ditulis oleh Ni Nyoman Rahmawati memfokuskan pada realitas ketimpangan gender yang terjadi kepada perempuan Bali. Penulis menyajikan narasi yang bertujuan untuk memperlihatkan upaya perempuan Bali dalam mencapai kesetaraan dengan dengan kaum laki-laki, yang hingga saat ini mendominasi hidup mereka. Penulis juga mendeskripsikan sejumlah “peran yang diharapkan” muncul dari seorang perempuan di dalam keluarga, misalnya menyelesaikan pekerjaan rumah tangga mereka. Selain itu, masyarakat Bali juga beranggapan bahwa perempuan sejak kecil harus dididik untuk menjadi istri yang mampu menuntaskan pekerjaan domestik sekaligus menunjukkan baktinya kepada sang suami. Kekalnya budaya patriarki juga dinilai semakin mengikat perempuan ke dalam hukum yang memupuk ketimpangan gender di Pulau Dewata ini. Bak eksploitasi tersembunyi, perempuan Bali seakan telah menerima ketidakadilan yang terjadi pada mereka tiap harinya karena menganggap “peran yang diharapkan” tersebut adalah *yadnya*—pengorbanan pada keluarga yang tulus. Tidak hanya itu saja, Ni Nyoman Rahmawati turut memaparkan sejumlah kesalahan pada tafsir konsep Hindu *purusa* dan *pradana*, yakni laki-laki (*purusa*) lebih tinggi dari perempuan (*pradana*). Pada penelitian ini, peneliti menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data wawancara. Hasil penelitian berakhir pada kesimpulan bahwa peran perempuan Bali pada sejumlah tugas di keluarga maupun masyarakat sangatlah penting, seperti pada acara ritual keagamaan. Maka dari itu, budaya patriarki yang mengikat sejatinya tidak dapat menafikan bahwa peran perempuan tetaplah besar dan penting sehingga sudah sewajarnya perempuan Bali memperjuangkan kesetaraan mereka di bawah dominasi laki-laki.

Penelitian selanjutnya berjudul “*Perempuan dan Budaya Patriarki dalam Tradisi, Keagamaan di Bali (Studi Kasus Posisi Superordinat dan Subordinat Laki-Laki dan Perempuan)*” yang ditulis oleh I Komang Agus Darmayoga. Penelitian ini memfokuskan bagaimana budaya patriarki di Bali menyebabkan ketidaksetaraan bagi kaum wanita. Adanya hubungan superordinat laki-laki atas wanita sebagai subordinat membuat mereka harus bekerja atas kuasa laki-laki. Wanita di Bali diajarkan untuk patuh pada laki-laki dan mengurus rumah tangga saja, padahal pada nyatanya wanita menempati posisi penting dalam ritual keagamaan di Bali, seperti peletakan sejajen di Bali yang hanya bisa dikerjakan oleh pihak perempuan. I Komang berpendapat bahwa dominasi patriarki yang ada di Bali menimbulkan perlawanan oleh kaum perempuan yang merasa bahwa peran mereka seharusnya setara dan tidak setiap saat harus patuh terhadap pria. Hasil akhir dari penelitian ini menyimpulkan bahwa perlawanan yang dilakukan oleh kaum perempuan di Bali, berakhir dengan terbentuknya sebuah konsensus atau kesepakatan bersama, dimana pihak

laki-laki membangun sebuah relasi dengan perempuan, dalam arti perempuan tidak lagi bekerja atas dasar kuasa perintah laki-laki, dan perempuan sudah diperbolehkan bekerja di luar rumah, seperti instansi pemerintah, politik dan lain sebagainya tidak seperti dulu.

Sedikit berbeda dengan penelitian sebelumnya, peneliti melakukan analisis terhadap ketimpangan gender di Bali dengan menggabungkan tiga konsep, yaitu budaya patriarki, kesetaraan gender, dan feminisme liberal. Diharapkan, penelitian ini akan menjawab pertanyaan besar yang peneliti ajukan, yakni bagaimana kentalnya sistem patrilineal di Bali, lokasi geografis yang mempengaruhi budaya patriarki, dan peran adat serta agama menyebabkan ketimpangan gender pada ranah keluarga dan sosial serta relevansinya saat ini?

## Metode

Penelitian dengan judul Kekaisaran Patriarki di Keluarga dan Kehidupan Sosial Masyarakat Bali: Peran Adat dan Agama merupakan penelitian yang membahas ketimpangan gender yang terjadi dalam lingkup keluarga dan sosial masyarakat di Provinsi Bali. Untuk dapat memahami fenomena tersebut, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang berorientasi pada pemahaman fenomena yang terjadi dalam kehidupan empiris masyarakat secara menyeluruh dengan cara mendeskripsikan hasil penelitian dalam format kata-kata. Adapun landasan filosofis penelitian yang peneliti gunakan ialah landasan konstruktivisme yang bertujuan memahami fenomena yang terjadi di masyarakat. Paradigma konstruktivisme berfokus dalam memahami makna dan mencari keterkaitan sebuah data sebagai hasil konstruksi sosial yang sifatnya subjektif.

Pada penelitian ini, penulis menggunakan gabungan data primer dan sekunder. Data primer akan peneliti peroleh dari hasil *Focus group discussion* (FGD) dengan mahasiswa Universitas Brawijaya yang berdomisili di Bali. Adapun penggunaan data sekunder yang peneliti peroleh dari literatur terkait adalah sebagai penunjang dan pelengkap penelitian. Dengan kata lain, informasi digali dengan cara mencari data-data yang diperlukan melalui literatur-literatur dan dokumen yang sudah ada. Peneliti menggunakan teknik *purposive sampling*. Teknik sampling tersebut dipilih karena peneliti menginginkan data yang mendalam dari sumber terpercaya. Sampel yang peneliti gunakan untuk mewakili populasi masyarakat Bali adalah mahasiswa Universitas Brawijaya yang berdomisili di Provinsi Bali. Alasan peneliti memilih sampel tersebut, peneliti menginginkan informasi faktual dari berbagai sudut pandang.

## Hasil dan Pembahasan

### Budaya Patriarki dalam Keluarga dan Kehidupan Sosial Masyarakat Bali

#### Budaya Patriarki dalam Keluarga Masyarakat Bali

Dari hasil analisis terhadap hasil data *focus group discussion* (FGD) terhadap 8 orang Mahasiswi dan 4 orang Mahasiswa Universitas Brawijaya yang berdomisili di Bali, peneliti mengidentifikasi budaya patriarki pada satuan unit terkecil masyarakat, yakni keluarga. Jika ditinjau lebih jauh, asal mula istilah patriarki berasal dari kata patriarkat yang memiliki pengertian sebagai struktur yang memosisikan peran laki-laki pada tempat yang sentral sekaligus penguasa tunggal dalam segala hal (Sakina & A., 2017, p. 71). Kebudayaan masyarakat yang

didominasi sistem patriarki menghasilkan kondisi timpang dalam masyarakat adat Bali. Tentunya, ketidakadilan dan kesenjangan gender ini akan berpengaruh besar terhadap aspek-aspek kegiatan tiap individu.

Dalam sistem kekeluargaan masyarakat Bali, anak dan cucu laki-laki dianggap penting kehadirannya karena dipercaya akan menjadi penerus hak-hak, kewajiban, warisan, dan tradisi keluarga. Sesuai dengan mandat sistem kekeluargaan patrilineal, anak akan meneruskan garis keturunan dari pihak bapak. Bahkan, masyarakat Bali percaya bahwa anak laki-laki sebagai “Suputra” (anak yang baik) (Hemamalini & Suhardi, 2015, p. 37). Anak baik yang dimaksudkan ialah anak yang dapat menolong keluarganya di akhirat nanti—dengan tujuan menghilangkan penderitaan keluarga. Seperti yang termaktub dalam kitab Adiparwa, keluarga yang mendapatkan anak laki-laki dianggap memperoleh kebahagiaan dunia yang hakiki. Maka dari itu, kelahiran anak laki-laki sangat didambakan dalam keluarga masyarakat Bali.

Sistem kekeluargaan patrilineal sebagai sumber kebudayaan patriarki yang dianut masyarakat Bali sangat berpengaruh pada berbagai aspek. Terutama dalam pembuatan hukum yang menyangkut kekeluargaan, seperti penentuan garis keturunan, pengangkatan anak, perkawinan, dan pembagian harta (Hemamalini & Suhardi, 2015, p. 37). Pengutamaan anak laki-laki ini menyebabkan termarjinalkannya perempuan dalam keluarga Bali. Berbeda dengan privilese yang diperoleh laki-laki, perempuan dalam keluarga Bali dianggap sebagai “titipan” yang akan dibawa pergi ketika ia menikah dan berkeluarga (Ni Nyoman Rahmawati, 2016, p. 59). Bahkan, perempuan Bali sudah dipersiapkan sedari kecil untuk menjadi milik keluarga sang suami kelak. Pembagian warisan pun dilakukan dengan mekanisme penghapusan nama anak perempuan apabila ia sudah menikah dan keluar dari keluarga. Selain itu, perempuan juga memperoleh perlakuan yang cenderung berbeda dengan yang didapat saudara lelakinya, seperti tingkat pendidikan yang diampu terkadang lebih rendah. Sebagaimana yang disampaikan oleh responden penelitian bahwa:

“Kalau di desa mengerjakan pekerjaan laki-laki itu dilarang. Jadi, ada perbedaan pekerjaan laki-laki dan perempuan dan aturan ini seperti sudah “pakem”. Walaupun saya belum pernah mengalami, tetapi sering mendengar dalam bidang pendidikan. Masyarakat itu mengatakan kalau pendidikan lebih penting untuk laki-laki daripada perempuan.”

Sebuah fakta menarik peneliti temukan selama penelitian berlangsung, yakni konsep penarikan keturunan di keluarga Bali. Konsep ini juga bersandar pada penempatan laki-laki pada posisi yang sentral sehingga memaksa keluarga yang tidak memiliki keturunan laki-laki sedapat mungkin mencari penerus yang ingin ditarik ke keluarga tersebut. Misalnya, anak perempuan—tanpa saudara lelaki—dalam sebuah keluarga diharuskan mencari kekasih yang bersedia untuk masuk ke dalam garis keturunan keluarganya apabila menikah nanti.

Apabila merujuk pada gagasan kaum feminisme liberal, kesetaraan gender akan dicapai dengan pemberantasan stigma buruk terhadap perempuan. Segala bentuk penindasan, ketidakadilan, dan diskriminasi yang diterima oleh kaum perempuan berakar dari pelabelan tersebut. Dalam hal ini, budaya patriarki yang tertanam dalam sistem kebudayaan keluarga masyarakat Bali memberikan peranan signifikan terhadap stigma buruk perempuan, perempuan sekadar titipan dan dinomorduakan. Dalam kacamata feminisme liberal, perempuan Bali harus memiliki kesempatan yang sama sekalipun di dalam keluarga. Mereka wajib mendapatkan hak untuk belajar, bekerja, dan berekspresi dengan bebas dari kaum yang mendominasi (Ni Nyoman

Rahmawati, 2016, p. 59). Untuk merangkum semuanya, gerakan feminisme bukanlah gerakan yang menginginkan pengangkatan salah satu gender saja, melainkan gerakan demi kesetaraan antara laki-laki dan perempuan.

### **Budaya Patriarki dalam Kehidupan Sosial Masyarakat Bali**

Berdasarkan data yang peneliti peroleh dari kegiatan penelitian, kehidupan sosial masyarakat Bali terbagi atas dua kategori, yakni sosial masyarakat dengan budaya patriarki yang kental dan sosial masyarakat dengan budaya patriarki yang telah mengalami pergeseran. Budaya patriarki yang kental mengakar kuat pada struktur sosial masyarakat Bali di pedesaan, sedangkan budaya patriarki yang telah mengalami pergeseran ada pada struktur sosial masyarakat perkotaan atau wilayah dengan persentase pendatang yang tinggi.

Kuatnya adat istiadat terpancar dari rumitnya rangkaian upacara yang dilaksanakan oleh sebagian besar masyarakat yang ada di beberapa kabupaten Bali, misalnya Kabupaten Bangli, Kabupaten Buleleng, dan Kabupaten Karangasem (Gelgel, 2016, p. 174). Hal ini tercermin pada fakta penempatan laki-laki sebagai penanggung peran terbesar dalam upacara adat pernikahan satu banjar masyarakatnya. Kehadiran laki-laki dalam upacara pernikahan satu banjar ialah wajib hukumnya karena lelaki akan menjadi tumpuan upacara. Namun, satu hal yang menarik adalah perkara pembagian tugas dalam adat istiadat masyarakat Bali yang cenderung berbeda dan unik. Pasalnya, dalam upacara pernikahan satu banjar, laki-laki bertugas untuk memasak dan mengurus semua rangkaian acara, sedangkan perempuan hanya bertugas untuk mempersiapkan sesajen atau 'bantenan'. Hal ini juga diutarakan salah seorang responden yang menjelaskan bahwa:

“ Di Bali pakai sistem kekerabatan patrilineal jadi garis keturunan di ambil dri ayah. Laki-laki dituntut sebagai tulang punggung dan berat tanggungannya dan hal ini berkaitan dengan adat yang kuat. Laki-laki itu dilihat pekerjaannya lebih berat. Misalnya, dalam upacara pernikahan dalam satu banjar, laki-laki kerabat itu wajib datang. Lak-laki sering diajak membantu di Pura. Maka dari itu, begitu besar kehadiran laki-laki dalam keluarga.”

Berbeda dengan kabupaten sebelumnya, Denpasar merupakan ibukota pulau dewata dengan jumlah penduduk sebesar 962.900 jiwa (BPS Provinsi Bali, 2022). Kota ini menjadi tujuan para pendatang untuk sekadar berlibur hingga bertempat tinggal. Menurut data hasil *focus group discussion*, budaya patriarki dan ketimpangan yang ditimbulkan olehnya sangat minim masuk dalam lingkup masyarakat ibukota. Pasalnya, penduduk Kota Denpasar sekarang ini banyak dipenuhi oleh para pendatang dalam negeri maupun luar negeri. Hal ini tentu saja berakibat pada pola pikir dan struktur sosial masyarakat yang ada. Masyarakat lebih berpikiran terbuka sehingga membuka kesempatan dan peluang efektif yang setara bagi perempuan. Hasil diskusi ini diperkuat dengan data statistik Provinsi Bali yang menunjukkan adanya peningkatan persentase keterlibatan perempuan sebagai tenaga kerja profesional dalam kurun waktu lima tahun terakhir di Provinsi Bali.

Tabel 1. Keterlibatan perempuan sebagai tenaga profesional di Provinsi Bali

Kabupaten/Kota	Persentase Keterlibatan Perempuan Sebagai Tenaga Profesional di Provinsi Bali Menurut Kabupaten/Kota (Persen)				
	2021	2020	2019	2018	2017
Kab. Jembrana	51.76	52.45	51.91	46.06	49.33
Kab. Tabanan	49.15	46.67	51.52	46.61	46.46
Kab. Badung	51.57	49.65	50.16	45.24	41.73
Kab. Gianyar	54.94	51.45	51.80	45.33	44.87
Kab. Klungkung	49.04	47.52	46.58	43.77	36.14
Kab. Bangli	42.93	41.79	43.46	42.61	37.47
Kab. Karangasem	46.69	38.51	37.56	37.71	36.24
Kab. Buleleng	43.54	45.53	45.50	40.80	41.16
Kota Denpasar	52.43	50.41	48.02	48.59	47.38
Provinsi Bali	50.89	49.12	48.05	45.58	44.17

Sumber: BPS Provinsi Bali, 2022

Persentase pada table 1 mendukung hasil penelitian yang membagi kuatnya budaya patriarki di Bali berdasarkan dua kategori, yakni daerah dengan budaya patriarki yang kuat dan yang telah mengalami pergeseran. Adapun Kabupaten Jembrana, Tabanan, Badung, Gianyar, Klungkung, dan Kota Denpasar memiliki persentase yang hampir setara di angka 49-52%. Kabupaten Tabanan merupakan salah satu kabupaten yang banyak dihuni oleh penduduk muslim yang bermobilisasi dari Provinsi Jawa Timur. Selain itu, Kabupaten Tabanan juga dikenal sebagai “Kampung Jawa” nya Provinsi Bali (Rizqyani, 2019, p. 14). Kemudian, letak geografis kabupaten Badung dan Gianyar yang tidak terlalu jauh dari Kota Denpasar menjadi faktor pergeseran budaya patriarki pada wilayah ini. Keterlibatan perempuan sebagai tenaga profesional di sejumlah kabupaten atau kota tersebut disebabkan faktor akulturasi yang banyak dibawa oleh para pendatang. Keterbukaan pikiran dan bergesernya struktur sosial di masyarakat membuka akses pembangunan dan pemberdayaan gender di wilayah-wilayah tersebut.

Menurut kaum perempuan Bali diambil dari hasil FGD penelitian terkait kesetaraan gender, ketiadaan diskriminasi antara perempuan dan laki-laki yang membuat terbukanya akses, partisipasi, dan kontrol atas pembangunan merupakan bentuk keterwujudan kesetaraan dan keadilan gender. Responden juga menambahkan bahwa keadilan gender sama halnya dengan pemerolehan manfaat adil dan berimbang dari pembangunan. Penulis menganalisis bahwa pernyataan tersebut sejalan dengan cita-cita kaum feminisme liberal dalam memandang kesetaraan gender. Kepemilikan akses dan tingkat partisipasi yang tinggi dari perempuan akan menjadi peluang bagi mereka untuk menggunakan sumber daya dalam mengambil keputusan (Ni Nyoman Rahmawati, 2016, p. 60). Dengan demikian, perempuan dengan bebas dapat melakukan pekerjaan yang paling sesuai dengan minat mereka bukan yang paling sesuai dengan ‘yang seharusnya’ dalam masyarakat adat.

### Ketimpangan Gender dalam Keluarga dan Sosial Masyarakat Bali

Masyarakat Bali dalam beberapa aspek kebudayaannya masih menerapkan sebuah sistem yang membedakan peran wanita dan pria. Perbedaan ini terlihat dalam perlakuan dan penerimaan perempuan dalam hal pendidikan yang mana menjadi salah satu aspek yang sangat ditentang dalam pandangan kaum feminisme liberal yang ingin hak-hak wanita dipandang dan disetarakan dengan pria. Adanya stigma bahwa perempuan tidak perlu menempuh pendidikan tinggi masih dapat dirasakan dalam kehidupan sosial masyarakat Bali. Budaya Patriarki yang mengakar pada adat budaya Bali menempatkan perempuan setelah pria dalam hal prioritas pendidikan. Padahal, pendidikan merupakan hak segala bangsa dan merupakan faktor penting bagi kesejahteraan hidup seorang individu. Menurut hasil penelitian, di beberapa daerah tertentu di Bali, khususnya pedesaan yang masih erat dengan budaya setempat, melarang wanita untuk melakukan pekerjaan laki-laki. Adat istiadat menjadi salah satu faktor penyebab ketimpangan gender ini masih terjadi di kehidupan masyarakat sosial Bali.

Berdasarkan hasil FGD yang peneliti lakukan dengan dua belas orang—8 orang perempuan dan 4 orang laki-laki— narasumber, struktur adat di Bali masih memberikan peran yang minim bagi perempuan untuk terlibat dengan kegiatan yang berkaitan dengan adat, khususnya dalam musyawarah yang berkaitan dengan masalah agama atau kegiatan sosial lainnya. Peran laki-laki masih lebih dominan, begitu pun dengan struktur hierarki yang ada masih mengutamakan laki-laki dan perempuan-perempuan hanya sebagai penopang dan pelengkap dalam kegiatan sosial, adat dan agama.

Tabel 2. Rata-Rata Lama Sekolah Provinsi Bali Menurut Kab/Kota dan Jenis Kelamin

Kabupaten/Kota	Rata-Rata Lama Sekolah Provinsi Bali Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin (Tahun)	
	Laki-Laki	Perempuan
	2021	2021
Kab. Badung	11.08	9.97
Kab. Klungkung	9.23	7.14
Kab. Karangasem	7.36	5.29
Kota Denpasar	11.88	11.14

Sumber: BPS Provinsi Bali, 2022

Meskipun demikian, tidak semua masyarakat Bali menerapkan budaya patriarki yang keras, masih terdapat masyarakat yang lebih terbuka terkait persamaan hak laki-laki dan perempuan. Bentuk ketimpangan gender di keluarga dan sosial masyarakat Bali di daerah perkotaan umumnya tidak terlalu terlihat karena zaman telah berkembang dan beberapa keluarga tidak lagi menerapkan tradisi yang memperlakukan perempuan dengan tidak adil, seperti pada data di atas persentase rata-rata lama sekolah anak perempuan dan laki-laki menunjukkan keadaan timpang. Antara Kota Denpasar dan Badung—yang lebih banyak pendatangnya—dengan Kabupaten Klungkung dan Karangasem menunjukkan bahwa kategori ketimpangan di Bali memang terbagi



atas dua, yakni daerah yang kuat budaya patriarkinya dengan daerah yang budaya patriarkinya perlahan mengikis.

Dalam menanggapi isu ini, feminisme melihat bahwa pemerintah memiliki peran yang sangat penting dalam menciptakan regulasi yang dapat menghilangkan kesenjangan gender di Bali. Menurut Margarit Eicher salah satu pegiat feminisme, setiap orang dewasa baik perempuan ataupun laki bertanggung jawab atas kesejahteraan ekonominya masing-masing (Setiawan et al., 2022, p.94). Namun, jika hal tersebut tidak memungkinkan, maka tanggung jawab akan diserahkan kepada negara untuk mengaturnya, bukan kepada keluarga laki-laki semata.

## Keterlibatan Norma dan Agama Masyarakat Bali terhadap Ketimpangan Gender

### Keterlibatan Agama Masyarakat Bali terhadap Ketimpangan Gender

Sebagaimana yang telah dijelaskan pada paragraf sebelumnya, sistem kekerabatan yang digunakan oleh hampir sebagian besar masyarakat Bali ialah kekerabatan patrilineal. Melalui sistem ini, garis keturunan di sebuah keluarga akan ditarik dari pihak bapak. Oleh karena hal itu, peran laki-laki dalam keluarga dan sosial masyarakat Bali sangatlah solid. Bahkan, menurut salah satu responden FGD, laki-laki Bali memikul tanggung jawab besar hingga waktu yang tidak ditentukan. Menurut data penelitian yang peneliti dapat, tradisi turun temurun ini berkaitan erat dengan ajaran agama masyarakat Bali. Bagi masyarakat Bali, adat istiadat yang mengakar pada kehidupan mereka bersinggungan dengan agama dan kepercayaan yang mereka anut, yakni agama Hindu ((I. Wayan Gede Wiryawan et al., 2015, p. 175). Beberapa ayat di dalam kitab agama Hindu pun banyak menegaskan peran penting laki-laki dalam sebuah keluarga.

Hasil *focus group discussion* menunjukkan agama Hindu tidak memberi hukuman atau sanksi apapun ketika sistem patrilineal yang memosisikan laki-laki pada posisi sentral tidak diterapkan. Hanya saja, beberapa ayat dalam kitab Hindu menegaskan peran penting lelaki (Sradha) dalam sebuah keluarga karena dianggap sebagai roh leluhur yang menjelma kembali ke dunia—dalam wujud keturunan laki-laki—untuk dapat menyelamatkan keluarga dan arwah tersebut dari lembah penderitaan (Rahmawati, 2016). Adapun dalam Kitab Manawadharma sastra bab IX sloka 137 menegaskan:

“Keturunan laki-laki mendudukkan dunia, cucu laki-laki meraih keabadian, tetapi melalui anak atas cucunya mencapai alam baskara.”

Hasil analisis peneliti berdiri pada satu preposisi, yakni adanya kontradiksi *output* budaya patriarki atau sistem patrilineal dengan pemahaman ajaran agama Hindu. Pengutamaan laki-laki dalam Hindu secara jelas sejalan dengan anjuran pemuliaan perempuan yang juga ditegaskan dalam beberapa ayat. Perempuan di ajaran Hindu diibaratkan sebagai representasi atau bentuk penjelmaan seorang dewi. Keterangan ini pun sejalan dengan data yang peneliti dapat melalui FGD bahwa dalam agama Hindu perempuan harus dihormati dan dimuliakan karena mereka taat pada hukum karma yang berlaku. Maka dari itu, peneliti menganalisis bahwa budaya patriarki yang berujung pada ketidaksetaraan gender pada masyarakat Bali sangat tak relevan dengan ajaran Hindu yang memuliakan perempuan. Pasalnya, budaya patriarki menjadi penyumbang termarjinalkannya perempuan Bali. Dengan kata lain, hukum adat Bali belum mampu merepresentasikan kesetaraan gender. Dalam praktiknya, pembagian hak waris, peran

dalam kehidupan sosial, perkawinan, dan perlakuan dalam keluarga cenderung berbeda antara laki-laki dan perempuan.

Gender menurut ajaran Hindu bukanlah pembeda perlakuan sosial antara laki-laki dengan perempuan, tetapi petunjuk bagi hal-hal yang pantas dilakukan oleh laki-laki dan perempuan (Ni Nyoman Rahmawati, 2016, p. 61). Analisis peneliti berujung pada pemahaman yang keliru akan pemaknaan gender pada masyarakat Bali. Perbedaan perilaku sosial dalam keluarga dan kehidupan sosial masyarakat Bali lahir dari salah penafsiran petunjuk pantas atau tidaknya sesuatu bagi perempuan dan laki-laki. Dengan kata lain, ajaran Hindu mendefinisikan gender sebagai kewajiban yang harus ditunaikan oleh masing-masing individu selayaknya yang telah difirmankan oleh Brahman. Hal ini termaktub dalam Kitab Manawa Dharmasastra [6] bab IX seloka 96 bahwa:

“Untuk menjadi ibu, wanita diciptakan. Untuk menjadi ayah, laki-laki diciptakan upacara keagamaan karena itu ditetapkan di dalam Weda untuk dilakukan oleh suami bersama istrinya.”

Kedudukan laki-laki dan perempuan dalam agama Hindu sama terhormat dan mulianya. Adapun yang menjadi pembeda di antara keduanya adalah tugas dan tanggungjawabnya sebagai kodrat manusia (guna karma) (Hemamalini & Suhardi, 2015, p. 37). Keduanya memang berbeda dikarenakan manusia yang lahir tidak mungkin menghindari hukum *rwabhineda*—konsep pembedaan dalam agama Hindu guna mencapai keharmonisan dan keseimbangan (Sari et al., 2022, p. 46)

### Keterlibatan Norma Masyarakat Bali terhadap Ketimpangan Gender

Hukum adat atau norma masyarakat Bali merupakan seperangkat aturan tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur aktivitas, memuat perintah, dan mencantumkan sejumlah larangan bagi masyarakat dalam berperilaku. Tujuan dibentuknya norma ini ialah guna menjaga keseimbangan dan keharmonisan antar individu maupun antar masyarakat desa di Bali. (Sukadana et al., 2021, p. 76). Seperangkat aturan di desa atau banjar biasa disebut sebagai *awig-awig* desa. *Awig-awig* desa dibentuk berdasarkan kesepakatan kolektif masyarakat tiap desa sebagai pengikat dan pemersatu antar mereka. Dengan kata lain, *awig-awig* adalah bentuk kontrol sosial guna mempertahankan nilai-nilai masyarakat Bali.

Menurut data hasil *focus group discussion* (FGD), norma masyarakat Bali erat kaitannya dengan praktik budaya patriarki sebagai hasil dari sistem kekeluargaan patrilineal. Penulis menganalisis bahwa norma yang hadir di dalam masyarakat dihasilkan dari kebiasaan yang dilakukan masyarakat Bali secara turun temurun—yang apabila tidak dilaksanakan akan menimbulkan rasa malu hingga sanksi sosial. Sebagian besar responden penelitian juga menggarisbawahi sanksi sosial yang diberikan pada pelanggar hukum adat di Bali. Sanksi sosial ini tidak hanya berdampak pada satu generasi saja, tetapi juga berdampak pada generasi mendatang. Sebagai contoh, urusan perkawinan pada masyarakat Bali merupakan hal yang krusial. Maka dari itu, setiap anak dalam keluarga diharapkan menikah dengan pasangan yang memang setara dan ‘baik’ menurut adat. Apabila hal tersebut tidak dipatuhi, maka sanksi sosial antargenerasi menjadi momok yang harus dihadapi.

peneliti menganalisis bahwa kehadiran awig-awig desa turut melestarikan ketimpangan gender dalam masyarakat Bali. Ketimpangan gender merupakan fenomena ketika peran kelamin sosial laki-laki dan perempuan mengalami perbedaan perilaku dalam kehidupan bermasyarakat (Aktaria & Handoko, 2012, p. 194). Dengan kata lain, laki-laki diproyeksikan sebagai pihak yang berkuasa, sedangkan perempuan dianggap sebagai pihak yang dikuasai. Dalam masyarakat Bali, keluarga yang tidak menggunakan sistem patrilineal—meskipun memiliki anak laki-laki dalam keluarga—akan menjadi buah bibir masyarakat dan mendapat sejumlah perlakuan khusus. Misalnya, sanksi kasepekang berupa pengucilan (tidak diajak bicara) oleh anggota masyarakat dalam satu banjar (Sukadana et al., 2021, p. 76). Hasil lain yang peneliti dapat ialah keyakinan para responden tentang kemustahilan hilangnya adat istiadat dalam kehidupan masyarakat Bali. Mereka percaya norma dan adat istiadat tersebut erat kaitannya dengan agama yang mereka anut. Oleh karena itu, meskipun perkembangan zaman berlangsung secara masif, masyarakat Bali masih akan memegang kuat akar adat istiadat mereka.

### **Pentingnya Kesetaraan Gender dan Relevansi Budaya Patriarki**

Kesetaraan gender mempunyai peran penting terhadap bagi pembangunan berkelanjutan negara, sekaligus menjadi upaya realisasi atas hak asasi manusia bagi semua orang. Tujuan kesetaraan gender adalah untuk menciptakan masyarakat di mana perempuan dan laki-laki dapat memiliki kesempatan, hak, dan kewajiban yang sama di semua bidang kehidupan. Dalam konteks program kependudukan dan pembangunan, kesetaraan gender sangat penting karena akan memungkinkan perempuan dan laki-laki membuat keputusan yang berdampak lebih positif pada kesejahteraan kehidupan mereka secara independen (Sulistyowati, 2021, p. 4). Pentingnya kesetaraan gender juga dikemukakan oleh responden penelitian. Ia menjelaskan bahwa:

“Kesetaraan gender itu sangat penting karena untuk apa emanisipasi wanita ada, tetapi daerah seperti Bali masih menganut budaya patriarki. Ketidaksetaraan gender itu mempengaruhi banyak bidang kehidupan. Misalnya, di sosial dan pendidikan. Pada pendidikan, ketimpangan sangat merugikan perempuan karena sejatinya perempuan akan menjadi madrasah bagi anak-anaknya nanti. Misalnya, dalam rumah tangga, perempuan beres-beres dan laki-laki kerja dan menurut saya itu kurang tepat. Jadi, laki-laki bisa ikut membantu pekerjaan perempuan dan sebaliknya. Budaya patriarki sudah tidak relevan karena zaman sekarang kesetaraan jauh lebih penting.”

Hasil penelitian menunjukkan sistem patriarki di keluarga dan masyarakat sosial Bali masih sangat kental dalam kebudayaannya. Hal ini mempengaruhi banyak aspek kehidupan, mulai dari pendidikan, kepemimpinan politik, ekonomi, hingga rumah keluarga di mana laki-laki dianggap sebagai kepala rumah tangga. Meskipun beberapa tahun belakangan telah terjadi pergeseran positif dalam hal sikap hukum dan sosial di masyarakat, namun sistem patriarki masih menjadi dominan dalam banyak budaya di Indonesia. Menurut kaum feminisme liberal, di kehidupan modern, seharusnya setiap perempuan dan laki-laki bisa mendapatkan hak dan jaminan kehidupan yang sama. Sehingga stigma bahwa perempuan itu lemah dan selalu butuh naungan dari kaum lelaki merupakan persepsi yang salah. Lebih lanjut, menurut sebagian besar responden penelitian, sistem patriarki tidak lagi relevan di era modern ini, mengingat perempuan seharusnya memiliki hak untuk mengatur kehidupannya sendiri terlepas dari budaya ia dibesarkan. Mengubah sistem patriarki yang ada saat ini memang menjadi tantangan tersendiri dan akan

membutuhkan lebih banyak upaya untuk benar-benar tercipta lingkungan yang adil dan sejahtera bagi kaum perempuan. Dengan demikian, dibutuhkan peran dari segala elemen masyarakat Indonesia untuk menjadi penggerak kesetaraan dan keadilan gender—baik dari individu sendiri maupun pemerintah.

## Penutup

Sistem kekeluargaan patrilineal dalam masyarakat Bali menempatkan anak laki-laki sebagai penerus hak, kewajiban, dan tradisi keluarga. Anak laki-laki dianggap penting untuk memperoleh kebahagiaan dan menghilangkan penderitaan keluarga. Namun, privilese ini menyebabkan perempuan termarginalkan dalam keluarga. Mereka dianggap sebagai "titipan" yang dibawa pergi saat menikah dan memiliki peran yang terbatas. Budaya patriarki ini juga mempengaruhi perlakuan terhadap perempuan dalam pendidikan dan pekerjaan. Berdasarkan penelitian, masyarakat Bali terbagi menjadi dua kategori, yakni mereka yang mempertahankan budaya patriarki kuat di pedesaan dan yang mengalami pergeseran di perkotaan dengan pendatang tinggi. Misalnya, di kota Denpasar, pendatang membawa perubahan positif dengan membuka kesempatan setara bagi perempuan, tercermin dalam peningkatan partisipasi mereka sebagai tenaga kerja profesional. Akar sistem patrilineal yang dianut masyarakat Bali bersumber dari ajaran agama Hindu, yakni mengutamakan peran laki-laki dalam keluarga. Meskipun agama juga memuliakan perempuan, budaya patriarki menyebabkan perbedaan perlakuan sosial antara laki-laki dan perempuan. Lebih daripada itu, norma dan adat istiadat Bali yang diawasi melalui awig-awig desa senantiasa mempertahankan ketimpangan gender sebab sanksi sosial dan ketidakmungkinan perubahan norma menciptakan kesetiaan terhadap sistem patriarki. Meskipun ada perkembangan zaman, masyarakat Bali tetap memegang teguh adat istiadat mereka, yang berdampak pada ketimpangan gender dalam kehidupan sosial mereka. Terlepas dari adat istiadat daerah, pemahaman menyeluruh terkait kesetaraan gender sangatlah penting bagi setiap elemen masyarakat untuk menciptakan lingkungan sosial yang adil dan sejahtera bagi kaum perempuan. Bahkan, sebagian masyarakat Bali juga berpendapat bahwa sistem patrilineal tidak lagi relevan jika terus memarginalkan perempuan di berbagai bidang kehidupan. Oleh karena itu, diperlukan kesadaran bagi setiap individu terkait isu kesetaraan gender dan dalam kasus ini pemerintah memiliki peran vital dalam memastikan setiap rakyatnya menerima hak yang sama.

## Daftar Pustaka

- Aktaria, E., & Handoko, B. S. (2012). Ketimpangan Gender Dalam Pertumbuhan Ekonomi. *Jurnal Ekonomi Pembangunan: Kajian Masalah Ekonomi Dan Pembangunan*, 13(2), 194. <https://doi.org/10.23917/jep.v13i2.168gelgel>
- Alifa Tulkhamiya. (2015). Analisis Feminis Liberal dalam Partisipasi Siswa Perempuan di Organisasi Siswa Intra Sekolah (Osis). *Sosialitas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Sosiologi-Antropologi*, 5(2).
- BPS Provinsi Bali. (2002). Bali dalam Angka Tahun 2002 Denpasar, Aryasta Jaya.
- Chotim, E. E. (2020). Kesetaraan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan Di Indonesia: Keinginan Dan Keniscayaan Pendekatan Pragmatis (Studi Terhadap Ukm Cirebon Home

- Made). *AKSELERASI: Jurnal Ilmiah Nasional*, 2(1), 70–82.  
<https://doi.org/10.54783/jin.v2i1.357>
- Gelgel, N. M. R. A. (2016). Perempuan Gianyar dan Belunggu Ranah Publik dan Privat. *Jurnal Kajian Bali*, 6(1), 174–210.
- Hemamalini, K., & Suhardi, U. (2015). Dinamika Perkawinan Adat Bali. *Dharmasmrti: Jurnal Ilmu Agama Dan Kebudayaan*, 14(27), 36–47. <https://doi.org/10.32795/ds.v14i27.45>
- I. Wayan Gede Wirayawan, Ketut Sukawati Lanang Putra Perbawa, & I. Wayan Wiasta. (2015). Hukum Adat Bali Di Tengah Modernisasi Pembangunan Dan Arus Budaya Global. *Jurnal Bakti Saraswati*, 4(2).
- Sari, N. P. M., Intan Pinatih, D. A. A., Juniarta, I. K., & Supriliyani, N. W. (2022). Dualitas Sekala-Niskala dalam Pararem Gering Agung: Memahami Penanganan Covid-19 Berbasis Adat dari Perspektif Kebijakan Publik di Bali. *Jurnal Kajian Bali (Journal of Bali Studies)*, 12(1), 43. <https://doi.org/10.24843/JKB.2022.v12.i01.p03>
- Qomariah, Dede Nurul. “Persepsi Masyarakat Mengenai Kesetaraan Gender Dalam Keluarga.” *Jurnal Cendekiawan Ilmiah PLS* 4, no. 2 (2019): 52–58.  
<https://doi.org/https://doi.org/10.37058/jpls.v4i2.1601>.
- Ni Nyoman Rahmawati. (2016). Perempuan Bali dalam Pergulatan Gender. *An Image Jurnal Studi Kultural*, 1(1), 58–64.
- Rizqyani, R. (2019). Proses Akulturasi Keruangan Komunitas Muslim Kampung Jawa Di Perkotaan Tabanan Bali. *Jurnal Litbang Sukowati : Media Penelitian Dan Pengembangan*, 3(2), 14. <https://doi.org/10.32630/sukowati.v3i2.77>
- Sakina, A. I., & A., D. H. S. (2017). Menyoroti Budaya Patriarki Di Indonesia. *Share : Social Work Journal*, 7(1), 71. <https://doi.org/10.24198/share.v7i1.13820>
- Setiawan, D., Wibisono, B., & Astuti, S. Y. (2022). Ketidaksetaraan Gender dalam Program FTV Suara Hati Istri: Suatu Kajian Analisis Wacana Kritis Norman Fairclough. *Journal of Feminism and Gender Studies*, 2(2), 94. <https://doi.org/10.19184/jfgs.v2i2.30730>
- Sukadana, I. K., Sudibya, D. G., & Karma, N. M. S. (2021). Sanksi Kasepekang Dalam Hukum Adat Bali. *KERTHA WICAKSANA*, 15(1), 72–79.  
<https://doi.org/10.22225/kw.15.1.2819.72-79>
- Sulistyowati, Y. (2021). Kesetaraan Gender Dalam Lingkup Pendidikan Dan Tata Sosial. *IJouGS: Indonesian Journal of Gender Studies*, 1(2).  
<https://doi.org/10.21154/ijougs.v1i2.2317>.